PREDATOR DI RUANG SAKRAL: MENGUAK SISI GELAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

Rabu, 03 Juni 2026 - Nurul Istiamuji

"Institusi pendidikan dan keagamaan sejatinya berdiri sebagai mercusuar moral, jangkar spiritual, dan ruang aman tempat kemanusiaan dirawat dan masa depan ditempa. Namun, lembaran hitam belakangan ini terjadi telah menyingkap realitas yang sebaliknya. Di balik dinding-dinding yang dianggap sakral, tumbuh subur predator yang memanfaatkan jubah otoritas dan kesucian untuk memangsa mereka yang tak berdaya. Kontradiksi mengerikan ini tidak hanya melahirkan trauma fisik, melainkan sebuah pengkhianatan eksistensial yang meruntuhkan definisi ruang aman itu sendiri."

Orang tua menitipkan anak-anaknya demi masa depan mereka dengan keyakinan tingginya tingkat spiritualitas yang ada di lingkungan pendidikan serta tingginya nilai keagamaan yang dimiliki para pendidik di lingkungan sekolah tersebut. Hal ini melahirkan satu keyakinan serta kepercayaan tentang adanya standar moral yang lebih tinggi berada di lingkungan tersebut. Tempat-tempat tersebut telah dianggap sebagai benteng suci yang melindungi manusia dari kebobrokan moral dunia luar.

Standar moral yang tinggi ini justru sering kali disalahgunakan sebagai tameng kelayakan. Publik terlanjur percaya bahwa tempat tersebut "suci" dan diisi oleh orang-orang "pilihan", sehingga pengawasan publik kemudian melemah. Pelaku menyadari dan memanfaatkan tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi tersebut untuk beroperasi tanpa dicurigai (menciptakan impunitas).

Lingkungan sekolah, kampus, pesantren, atau rumah ibadah seharusnya menjadi ruang yang paling aman bagi anak-anak ataupun mereka yang menjalankan rutinitas keagamaan; di mana seseorang yang awalnya tidak berpendidikan, atau memiliki jiwa yang rapuh, datang untuk belajar, bertanya, dan bertumbuh tanpa rasa takut. Ruang aman berarti ada perlindungan fisik, emosional, dan spiritual. Namun kenyataannya, bagi sebagian predator, karakteristik ruang aman ini justru menjadikannya tempat berburu yang ideal.

Ketika kekerasan seksual terjadi di jalanan oleh orang asing, traumanya besar. Namun, ketika kekerasan seksual terjadi di dalam "ruang sakral" oleh sosok otoritas (guru, dosen, pemuka agama), dampaknya berlipat ganda menjadi apa yang disebut dalam psikologi sebagai betrayal trauma (trauma pengkhianatan). Korban tidak hanya terluka secara fisik dan seksual, tetapi fondasi kepercayaan mereka terhadap keadilan, institusi, moralitas, bahkan Tuhan (dalam konteks keagamaan) ikut runtuh.

Dampak kejahatan seksual yang terjadi pada diri seseorang ini sungguh luar biasa dahsyat. Korban berisiko mengalami trauma psikologis kronis, mulai dari ketakutan, kecemasan, depresi, hingga Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Lebih jauh lagi, serangan ini mengakibatkan krisis eksistensial dan spiritual (spiritual trauma), di mana korban mengalami krisis kepercayaan tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada institusi iman atau konsep keadilan spiritual itu sendiri. Secara jangka panjang, bayang-bayang ini turut menghancurkan masa depan korban melalui dampak sosial dan akademik, seperti putus sekolah atau kuliah, kehilangan karier, hingga isolasi dari lingkungan sosial.

Seorang predator dalam melakukan aksi kejinya sering kali memanipulasi konsep ketaatan, takzim, atau dogma agama untuk membungkam daya kritis korban. Korban di dalam institusi ini biasanya dikondisikan untuk patuh, menghormati otoritas, dan tidak skeptis. Akibatnya, ketika kekerasan terjadi, korban mengalami cognitive dissonance (kebingungan mental) karena tempat yang seharusnya paling aman justru menjadi tempat mereka dihancurkan.

Guna memutus rantai kejahatan ini, diperlukan upaya dan solusi secara sistemik melalui reformasi hukum dan regulasi. Langkah penting sebenarnya telah dipancangkan di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Permendikbudristek No. 30/2021. Payung hukum ini tidak hanya mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi juga memperkuat hak korban atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Tantangan terbesarnya kini adalah optimalisasi implementasi di tingkat akar rumput, termasuk keberanian memberikan tindakan tegas berupa sanksi hukuman yang berat bagi pelaku.

Selain penguatan regulasi tersebut, institusi terkait perlu membangun mekanisme pengaduan yang independen dan

aman. Salah satunya dengan membentuk satgas atau posko pengaduan luar yang mandiri, sehingga proses penanganannya objektif dan tidak diintervensi oleh pimpinan institusi tempat kasus tersebut terjadi.

Di sisi lain, benteng pencegahan juga harus dibangun sejak dari lingkungan rumah. Orang tua wajib memberikan edukasi seksual dan pemahaman batasan (boundaries) sejak dini kepada anak-anak mengenai hak atas tubuh sendiri (bodily autonomy) serta batasan relasi yang sehat, bahkan dalam konteks keagamaan. Budaya "manut" buta juga perlu didekonstruksi. Anak-anak harus diajarkan untuk bersikap kritis dan berani menolak hal-hal yang melanggar batas atau tidak baik, tanpa harus menghilangkan rasa hormat mereka pada nilai-nilai luhur.

Namun, kepemilikan instrumen hukum saja tidak akan pernah cukup. Menghapus kekerasan seksual membutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan negara, masyarakat, keluarga, institusi pendidikan, media, dan individu.

Sebab, salah satu akar masalah terdalam dari kekerasan seksual adalah budaya yang masih menormalisasi relasi kuasa yang timpang dan menyalahkan korban (victim blaming). Pertanyaan spekulatif seperti "mengapa korban tidak melawan?" atau "mengapa berpakaian seperti itu?" menunjukkan bahwa empati publik terhadap korban masih sangat rendah. Padahal, kekerasan seksual terjadi bukan karena pakaian, waktu, atau perilaku korban, melainkan murni karena pilihan pelaku untuk melakukan kekerasan.

Oleh karena itu, pendidikan menjadi strategi utama untuk memutus rantai kultural tersebut. Pendidikan tentang consent (persetujuan), penghormatan terhadap tubuh, kesetaraan gender, dan batasan relasi harus dikenalkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Anak-anak perlu diajarkan bahwa tubuh mereka berharga dan tidak boleh disentuh tanpa izin. Remaja juga perlu memahami bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, bukan dominasi kuasa.

Selain aspek edukasi, sistem perlindungan terhadap korban harus diperkuat secara masif. Banyak korban enggan melapor karena proses hukum yang panjang, melelahkan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru mengalami reviktimisasi (menjadi korban dua kali) ketika memberikan kesaksian. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, guru, dan pekerja sosial wajib memiliki perspektif yang berpihak pada korban. Layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum harus mudah diakses, terutama di daerah-daerah yang masih minim layanan perlindungan.

Di era modern ini, media dan ruang digital juga memegang peran besar. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat edukasi dan ruang solidaritas yang kuat bagi korban. Namun di sisi lain, ruang digital kerap menjelma menjadi tempat penyebaran kekerasan berbasis gender, perundungan, hingga eksploitasi. Karena itu, literasi digital dan etika bermedia harus diperkuat agar masyarakat mampu menciptakan ruang digital yang aman dan suportif.

Pada akhirnya, menghapus kekerasan seksual bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis perempuan semata; ini adalah tanggung jawab kemanusiaan bersama. Kaum laki-laki perlu terlibat aktif dalam membangun budaya yang menghormati perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan. Keluarga harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk terbuka dan bercerita. Begitu pula kampus, sekolah, tempat kerja, serta komunitas keagamaan wajib memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang jelas dan transparan.

Memutus rantai fenomena gunung es kekerasan seksual membutuhkan keberanian kolektif untuk berbicara, mendengar, dan bertindak. Ketika masyarakat berhenti menghakimi korban dan mulai fokus penuh pada pertanggungjawaban hukum pelaku, saat itulah perubahan nyata akan terjadi. Indonesia yang aman dari kekerasan seksual hanya dapat terwujud jika seluruh elemen bangsa bergerak bersama-bukan sekadar bereaksi secara reaktif ketika sebuah kasus menjadi viral, melainkan dengan konsisten membangun budaya hormat serta perlindungan yang berkelanjutan.